



Buletin Parlementaria

Nomor 1114/IV/VII/2020 • Juli 2020

DPR Bersama Pemerintah Dukung Industri Pertahanan Nasional



3 Puan Maharani
Resmikan Monumen
Soekarno di Aljazair



4 DPR Harap Uji Klinis
Vaksin Covid-19 Berjalan
Baik dan Cepat



9 772614 339005

DPR Bersama Pemerintah Dukung Industri Pertahanan Nasional

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan industri pertahanan nasional, mengingat pentingnya industri pertahanan di dalam menjaga kedaulatan bangsa. Presiden Joko Widodo juga sudah menjanjikan mendorong industri pertahanan nasional dan Komisi I DPR RI telah melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mendorong industri pertahanan nasional untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Karena itu, kita dorong yang saat ini sedang dijangkau adalah 4 miliar peluru (amunisi), kemudian ada beberapa jenis senjata yang juga dalam proses kontrak dengan Kementerian Pertahanan serta Rantis (Kendaraan Taktis) Maung,” ungkap Meutya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI meninjau PT. Pindad (Persero), Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/7).

Sebagaimana diketahui, Kemenhan dan PT. Pindad sudah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Mulai dari tahun 2020 hingga 2023, PT. Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kemenhan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun. Pada tahun 2020, Kemenhan memiliki anggaran hingga Rp 131 triliun, meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 110 triliun. Sementara tahun 2021, Kemenhan sudah mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 129,3 triliun.

Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi

industri pertahanan dalam negeri. “Ini merupakan sebagian dari banyak-banyak produk-produk dari PT. Pindad yang perlu didorong untuk terus maju sehingga targetnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam rangka industri pertahanan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Meutya menyampaikan bahwa implementasi UU Industri Pertahanan sudah berjalan, walaupun tidak sekaligus menggunakan produk dalam negeri namun kemajuan industri pertahanan nasional terus terlihat nyata. “Walaupun kita ada impor alutsista, di situ tetap ada *transfer of knowledge*,

itu yang menjadi prasyarat ketika kita melakukan kerja sama dengan luar negeri. Di dalam negeri sendiri, kita harapkan PT. Pindad bisa membantu dalam mengembangkan industri pertahanan nasional,” ujar Meutya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu juga menegaskan bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah terhadap industri pertahanan nasional yaitu dengan membeli hasil produk-produknya, karena banyak produk-produk industri pertahanan nasional yang memiliki daya saing dengan produk luar dan patut dibanggakan. ■ skr/sf



Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI saat meninjau PT. Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Foto: Singgih/MAN



Puan Maharani Resmikan Monumen Soekarno di Aljazair

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meresmikan Monumen Soekarno di Kota Aljir, ibu kota Aljazair secara virtual. Diharapkan, keberadaan monumen tersebut semakin mempererat hubungan RI dengan negara di kawasan Afrika. Puan berharap nantinya akan dapat berkunjung ke Aljazair untuk menyaksikan sendiri Monumen Soekarno sebagai simbol dari kuatnya persahabatan Indonesia - Aljazair.

“Mohon maaf saya tidak dapat hadir secara fisik di Aljazair karena adanya batasan perjalanan internasional akibat Pandemi Covid-19. Saya berharap Monumen Soekarno ini menjadi pengingat bagi kita semua atas kuatnya semangat dan persahabatan yang dimiliki Indonesia dengan Aljazair di sepanjang sejarah kedua negara kita,” kata Puan dalam sambutan peresmian Monumen Soekarno di Kota Aljir, Aljazair, Sabtu (18/7). Puan mewakili keluarga, menyampaikan sambutannya secara daring dari kediaman dinas Ketua DPR RI di Jakarta.

Peresmian monumen Soekarno berlangsung pukul 10 pagi waktu setempat. Hadir di lokasi acara Menteri Luar Negeri Aljazair Sabri Boukadoum, Dubes RI untuk Aljazair Safira Machrusah, Gubernur Provinsi Aljir Youcef Cherfa; Presiden Indonesia-Algeria Friendship Group of the Algerian Parliament Lakhdar Brahimi serta Perwakilan PT. WIKA dan Pertamina yang membangun monumen tersebut.

Menurut Puan, sejarah RI-Aljazair tak bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga negara di kawasan Maghribi itu merdeka pada tahun 1962. “Pada tahun 1955 di Bandung, Presiden Soekarno mengundang delegasi kelompok perjuangan kemerdekaan Aljazair untuk turut berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika. Saat itu Indonesia sebagai Negara baru berumur 10 tahun dan Aljazair masih memperjuangkan kemerdekaannya,” terang Puan.



Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani. Foto: Kresno/MAN

Sayangnya menurut Dubes RI untuk Aljazair Safira Machrusah, belum ada simbol Soekarno di Aljazair. Karenanya, pihak Kedubes RI menginisiasi pembangunan monumen Soekarno sejak 2016. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Duta Besar Safira Machrusah dan seluruh staf atas kerja kerasnya dalam menginisiasi pembangunan Monumen Soekarno ini,” ungkap Puan sembari mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Pemerintah People’s Democratic Republic of Algeria dan Pemerintah Provinsi Aljir atas sambutan hangat dan bantuannya dalam pendirian Monumen Soekarno.

Monumen Soekarno terdiri dari taman dan patung setengah badan Soekarno yang terletak di tengah-tengah ibukota Aljazair. Lokasinya berada di bundaran simpang Jalan Mustapha Khalef Ben Aknoun dan Chemin Arezki Mouri di Kota Aljir. Sementara, desain monumen merupakan hasil karya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan memberi penghargaan tinggi kepada pematung Dolorosa Sinaga yang membangun patung Presiden Soekarno untuk monumen ini. ■ **ann/sf**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moerpoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Harap Uji Klinis Vaksin Covid-19 Berjalan Baik dan Cepat



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Yoga/MAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik datangnya vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech, Ltd asal China yang akan diujicoba di Indonesia, bekerja sama dengan PT. Bio Farma. Ia berharap uji coba vaksin dapat berjalan baik dan cepat, sehingga masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

“Sementara ini vaksin uji coba sudah datang, kami mengapresiasi kalau memang vaksinnya sudah ada. Tapi kan mesti uji coba klinis dulu,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu kepada awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

”

KALAU NANTI SELESAI UJI COBA, KITA LIHAT COCOK APA ENGGAK. INI MASALAH YANG DITIMBULKAN KAN KALAU ENGGAK COCOK KEMUDIAN DICoba ATAU DIPERGUNAKAN

Dasco menambahkan, menurut informasi yang didapatkannya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BUMN Farmasi, dalam hal ini Bio Farma, sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). “Mudah-mudahan uji klinis tersebut dapat berjalan baik dan cepat,” harap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia menilai, jika vaksin ini cocok untuk situasi dan kondisi serta karakteristik Negara Indonesia, sehingga bisa membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. “Kalau nanti selesai uji coba, kita lihat cocok apa *enggak*. Ini masalah yang ditimbulkan kan kalau *enggak* cocok kemudian dicoba atau dipergunakan,” imbuh Dasco. ■sf

Perkuat Pertanian Sebagai Arah Baru Ekonomi Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan berbagai upaya harus dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19, agar Bangsa Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi lebih dalam, salah satunya adalah memperkuat produksi pertanian. Menurutnya, diperlukan reorientasi ekonomi baru karena Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Reorientasi yang dimaksudkan salah satunya dengan memperkuat sektor pertanian. “Pertanian adalah solusi menghadapi krisis, 75 persen desa desa kita adalah desa pertanian,

dan mayoritas penduduk Indonesia pendapatannya bertumpu pada sektor pertanian dan sumber daya alam, karenanya dibutuhkan perhatian khusus ke sektor ini,” ujar Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, saat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/7).

Lebih jauh Gus Muhaimin menjelaskan bahwa reorientasi ekonomi baru ke sektor pertanian ini dibutuhkan karena Indonesia harus menjadi kekuatan pangan dunia. “Kita harus keluar dari ketergantungan global, khususnya dari sektor pertanian dan pangan. Bangsa Indonesia harus berdaulat pangan, kita tidak boleh menggantungkan nasib pangan 260

”

PERTANIAN ADALAH SOLUSI MENGHADAPI KRISIS, 75 PERSEN DESA DESA KITA ADALAH DESA PERTANIAN

jutaan rakyat Indonesia dari luar karena itu sangat berbahaya jika terjadi krisis,” tegas Gus Muhaimin.

Dalam kesempatan ini, Rektor IPB Prof Arif Satria menjelaskan dan menunjukkan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh IPB di bidang teknologi pertanian dan pangan berbasis 4.0, serta dengan mendorong regenerasi petani dengan menciptakan sociopreneur, misalnya dengan mengembangkan program santrienterpreneur.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin semakin optimis bahwa gagasan untuk melakukan reorientasi ekonomi baru ke sektor pertanian dapat diwujudkan karena adanya dukungan dari Perguruan Tinggi dan para pakar. Dia menegaskan bahwa apa yang digagas oleh *civitas academica* IPB sejalan dengan apa yang sedang didorong oleh dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI Korkesra.

“Saya sudah memerintahkan kepada semua calon pimpinan daerah yang diusung oleh PKB untuk melakukan kontrak politik dengan menjalankan reorientasi ekonomi baru ke sektor pertanian dan ekonomi alternatif lainnya yang menyejahterakan rakyat dan tidak merusak lingkungan,” tutup legislator dapil Jawa Timur VIII itu. ■ hs/sf



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar Kunjungan Kerja ke IPB, Jawa Barat. Foto: Dok/MAN

Jalankan Program Ketahanan Pangan, Korem 064 MY Patut Diapresiasi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas upaya satuan jajaran Komando Resor Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf atas upaya keterlibatan dalam program ketahanan pangan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan langkah Presiden Joko Widodo yang belum lama ini menunjuk Menteri Pertanian Prabowo Subianto menjadi *leading sector* Lumbung Pangan Nasional.

“Memang anggarannya masih terlalu kecil, nanti akan kami diskusikan dan mudah-mudahan bisa kita tambah anggaran di Kementerian Pertahanan. Saya mengapresiasi kinerja prajurit di sini, padahal ini adalah tugas tambahan dari Panglima Pangdam. Mereka diinstruksikan agar memanfaatkan lahan-lahan tidur supaya ditanami pangan untuk kebutuhan masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Tim Kunker Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Korem 064/Maulana Yusuf di Kota Serang, Provinsi Banten, Jumat (17/7).

Utut meminta agar Korem 064/Maulana Yusuf terus meningkatkan kemandirian TNI bersama rakyat dan segera membuat kebutuhan anggaran program ketahanan pangan secara rinci dan disampaikan kepada Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI. Selain itu, sarana dan prasarana seperti peningkatan status Rumah Sakit Kencana menjadi RS tingkat III dan infrastruktur kendaraan dinas di sini menjadi perhatian Komisi I DPR RI.

“Ini menjadi 3 poin utama yang harus kita dukung, apalagi kinerja mereka patut diapresiasi. Secara umum kondisi



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Tim Kunker Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Korem 064/Maulana Yusuf di Serang, Banten. Foto: Jaka/MAN

wilayah Banten saat ini kondusif, berarti mereka telah berhasil melaksanakan tugas secara terbatas sesuai perintah dan program yang diberikan dari komando atas termasuk juga dalam penanganan Covid-19, penerapan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB), program ketahanan pangan nasional, dan ancaman megatrusted di Provinsi Banten,” terang legislator dapil Jawa Tengah VII ini.

Dalam kesempatan yang sama, Danrem 064/Maulana Yusuf, Gumuruh Winardjatmiko mengatakan, perihal urusan pangan, pihaknya masih memiliki banyak kekurangan selain anggaran. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar perlunya dukungan dari kementerian terkait dalam kegiatan ketahanan nasional di bidang pangan dan perlunya dukungan *offtaker* nasional untuk menyerap hasil pertanian bersama masyarakat.

“Pengalaman kami bertani dengan masyarakat, karena tidak ada yang menyerap hasil panen akhirnya dikuasai oleh para tengkulak. Tentu ini sangat merugikan masyarakat karena membuat harga jatuh di tingkat petani. Belum lagi, ada di suatu daerah para pengusaha yang menguasai hasil panen masyarakat. Setelah kami selidiki, memang dari awal pengusaha ini yang membiayai para petani, dari mulai bibit sampai kebutuhan hidup per hari dari para petani dibiayainya,” ungkap Gumuruh.

Gumuruh juga menyampaikan, pihaknya berharap Komisi I DPR RI juga memberikan dukungan sarana dan prasarana, seperti rehabilitasi kantor, perumahan, dan dukungan kendaraan dinas. Juga peningkatan sarpras dalam penanganan Covid-19 seperti alat pelindung diri (APD), *hand sanitizer*, hingga disinfektan. ■ jk/sf

Pajak Ekspor Hortikultura Tinggi, Komisi IV akan Bersurat Kepada Kemenkeu

Komisi IV DPR RI mendapat masukan dari Direksi PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) Lampung terkait pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap ekspor sejumlah komoditas hortikultura asal Lampung. Bahkan untuk masuk pasar Eropa dan Asia, komoditas seperti nanas dan pisang dikenakan pajak hingga mencapai 56 persen. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pihaknya akan melayangkan surat ke Kementerian Keuangan terkait fakta pajak ekspor hortikultura yang sangat tinggi.

“Dalam waktu masa sidang yang akan datang, setelah kita minta masukan, bukan dari GGPC saja tapi juga dari berbagai pihak, kami akan

buat surat ke Kementerian Keuangan. Bila perlu ke Kemenko Perekonomian atau ke Presiden, kami akan buat (surat). Kami akan sampaikan bahwa ini kenyataan di lapangan yang terjadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor apabila dikenakan pajaknya sangat tinggi,” kata politisi PDI-Perjuangan ini usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC, di Lampung, Selasa (21/7).

Sebelumnya, Government Relation PT. GGPC Willy Soegiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pajak ekspor seperti nanas dan pisang dikenakan pajak tinggi saat masuk pasar Eropa atau Asia. Ia mencontohkan salah satunya adalah ekspor ke Turki dimana dikenakan pajak hingga 56

persen. Padahal perdagangan ekspor dari Malaysia hanya dikenakan pajak 35 persen. “Bertahun-tahun, produk ekspor kita suka mendapat koreksi di negara luar. Tapi Alhamdulillah, dengan (pajak selangit) itu pun kita masih bertahan,” kata Willy.

Willy menjelaskan pada 2019, ekspor buah kaleng GGPC mencapai 13.500 kontainer dan buah segar sekitar 4.000 kontainer. “Ekspor per hari 40-50 kontainer. Pada 2019, Indonesia menjadi *supplier* nanas terbesar di dunia,” jelasnya. Willy menambahkan, saat ini pihaknya membutuhkan persetujuan hukum dan kemudahan perizinan usaha. “Kepada siapa lagi kami akan mengadu jika tidak ke wakil rakyat,” harap Willy kepada Komisi IV DPR RI. ■ man/sf



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Direksi PT. GGPC, di Lampung. Foto: Andri/MAN

Komisi VI Dorong Kontribusi Phapros Tingkatkan Produksi Obat Nasional

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong PT. Phapros berkontribusi dalam peningkatan produksi obat-obatan, vitamin dan suplemen nasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menekankan pentingnya kedaulatan kesehatan negara yang masih tertinggal cukup jauh dengan negara maju.

Hal tersebut diungkapkannya ketika memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT. Phapros di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/7), sebagai tindak lanjut dari rapat-rapat kerja Komisi VI DPR RI yang lebih mencermati peran dari BUMN Farmasi dalam kaitannya memberikan kontribusi penanganan pandemi Covid-19. Kunjungan ini turut dihadiri Komisaris Utama PT. Kimia Farma Untung Suseno Sutarjo, Dirut PT Kimia Farma Verdi Budidarmo, hingga

Dirut PT. Phapros Hadi Kardoko.

Aria Bima mengatakan, Komisi VI DPR RI sepakat dengan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa salah satu *roadmap* daripada Kementerian BUMN empat tahun ke depan ini adalah bagaimana kemandirian kesehatan, baik menyangkut masalah obat-obatan, vitamin dan alat kesehatan bisa berdaulat.

“Pandemi Covid-19 menggugah kita untuk bagaimana BUMN menjadi *leader* (pemimpin) dalam pemenuhan bahan baku farmasi. Komisi VI mendukung kerja sama PT Phapros dengan pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Semangat BUMN Farmasi dalam menghadapi pandemi Covid-19 khususnya Phapros di bawah *holding* Kimia Farma untuk memajukan industri farmasi nasional. Kita akan mempunyai

perusahaan farmasi nasional yang bisa dibanggakan untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional bahkan ekspor,” paparnya.

Dengan *holding* farmasi, diharapkan antara riset dan *development* bisa berjalan beriringan antara Phapros, Kimia Farma, Indo Farma, Bio Farma bisa menjadi lembaga riset yang dibiayai bersama-sama. Pemerintah harus mensinergikan antara Kementerian Kesehatan, BUMN, Perguruan Tinggi dalam proyek-proyek riset untuk mendukung pengembangan *holding* farmasi kita. Jadi bukan soal bahan bakunya yang sulit tapi risetnya yang mahal untuk menemukan jenis bahan baku obat yang dibutuhkan oleh industri farmasi nasional.

Ia menambahkan, riset dan *development* untuk menemukan berbagai macam jenis bahan baku obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan lokal (hutan) maupun laut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar. “Kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar tapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena ketergantungan kita dengan bahan baku obat impor yang dahulu kita hitung lebih murah ketimbang harus memproduksi sendiri,” ucap Aria Bima.

Politisi dapil Jawa Tengah V ini mendorong industri farmasi nasional untuk lebih banyak memanfaatkan bahan baku lokal meskipun harganya mungkin lebih mahal dan tidak kompetitif dibandingkan bahan baku impor. Tetapi dengan keberpihakan kepada sumber daya alam nasional diharapkan jangka panjang akan menjadikan industri farmasi nasional lebih mandiri bahkan bisa ekspor. ■ oji/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima ketika memimpin Kunjuran Komisi VI DPR RI ke PT Phapros. Foto: Oji/Man

Komisi VI Minta Kimia Farma Turunkan Impor Bahan Baku Obat

mengetahui lebih besar kapasitas Kimia Farma dalam memproses bahan-bahan obat yang berpotensi untuk menanggulangi Covid-19.

Demer menyatakan, berdasarkan hasil tinjauan Komisi VI DPR RI ini, dapat disimpulkan bahwa Kimia Farma berpotensi memproduksi bahan baku obat-obatan dengan tanpa harus lagi mengimpor. Untuk itu, legislator Dapil Bali itu mengatakan pihaknya



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Tim Kunker Komisi VI DPR RI ke PT. Kimia Farma, Bekasi, Jawa Barat. Foto: Puntho/MAN



INGIN MEMASTIKAN KIMIA FARMA SIAP DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 INI, TERUTAMA TENTANG PENYEDIAAN OBAT-OBAT. KAMI JUGA INGIN MEMASTIKAN, KIMIA FARMA AKAN MENURUNKAN BAHAN BAKU IMPOR UNTUK OBAT-OBATAN ITU

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta PT. Kimia Farma sungguh-sungguh siap dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih melanda Indonesia saat ini. Terutama, dalam penyediaan obat-obatan, yang ke depannya Kimia Farma diminta untuk tidak lagi bergantung kepada bahan baku impor.

Selain itu, tegas Demer, sapaan akrabnya, PT Kimia Farma didesak untuk menurunkan bahan baku obat-obat impor yang sekarang ini mencapai persentase 90 persen. Hal itu ditegaskan Demer, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, yang salah

satunya meninjau PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Bekasi, Jawa Barat, Senin (20/7).

“Komisi VI ingin memastikan Kimia Farma siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, terutama tentang penyediaan obat-obat. Kami juga ingin memastikan, Kimia Farma akan menurunkan bahan baku impor untuk obat-obatan itu. Sehingga, nantinya kita tidak terlalu tergantung kepada bahan baku obat-obatan impor yang persentasenya sudah mencapai 90 persen,” ujar Demer.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan Komisi VI DPR RI mengunjungi pabrik dan laboratorium milik Kimia Farma. Tujuannya, ungkap Demer, untuk

akan mengusulkan kepada Pemerintah agar Kimia Farma mendapatkan Penyerahan Modal Negara (PMN).

“Ke depannya, kami usulkan Kimia Farma kepada Pemerintah untuk mendapatkan PMN. Disisi lain, kami juga sangat *concern* terhadap TKDN. Karena, di Indonesia sudah ada sebenarnya bahan-bahan baku obat-obatnya. Sehingga, pengolahannya kami genjot. Sehingga, kami betul-betul berharap Kimia Farma nantinya benar-benar bisa menurunkan bahan baku impor untuk obat-obatan tersebut,” pungkasnya. ■ pun/sf

Gunakan Skema MCB, Krakatau Steel Dapat Dana Talangan Rp 3 Triliun



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin rapat Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Krakatau Steel. Foto: Gerald/MAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan bahwa dana talangan atau dana pinjaman yang diberikan kepada PT. Krakatau Steel (Persero) dengan nilai Rp 3 triliun bukan merupakan dana bantuan secara langsung yang diberikan Pemerintah sebagaimana Penyerahan Modal Negara (PMN). Kucuran dana ini dari Pemerintah kepada Krakatau Steel ini menggunakan skema *Mandatory Convertible Bond* (MCB).

“Jadi memang bukan PMN secara langsung. Kita (Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN) memutuskan Krakatau Steel mendapat pinjaman

dengan skema *Mandatory Convertible Bond* (MCB) agar pada waktunya nanti dapat dijadikan saham,” jelas Hekal usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT. Krakatau Steel, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa (21/7).

Masih kata Hekal, adanya pertimbangan kepemilikan saham dan merupakan perusahaan terbuka (Tbk), sehingga Komisi VI DPR RI meyakini Krakatau Steel dapat mempunyai program-program saham publik. “Dalam pertemuan ini kita dapat melihat bahwa Krakatau Steel telah memiliki beberapa industri baja dalam negeri yang sudah dapat bersaing dengan produk impor,” analisa politisi Partai Gerindra tersebut.

Dengan demikian, Komisi VI DPR RI berharap agar Krakatau Steel dapat bisa meningkatkan baik produktivitas, efisiensi, serta mengambil kebijakan investasi yang tepat. Sementara itu, Direktur Utama PT. Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, dana talangan ini akan digunakan untuk memberi relaksasi bagi pelanggan.

Nantinya Krakatau Steel bisa memberikan relaksasi pembayaran kepada pelanggan. Tujuannya, agar pelanggan tetap bisa memesan baja dan tetap beroperasi. “Ini untuk menjaga industri hilir baja dan industri pengguna baja untuk tetap beroperasi,” ujar Silmy di hadapan Tim Kunker Komisi VI DPR RI. ■ opi/sf

Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker ini Komisi VIII memberikan perhatian pada dampak sosial dari pandemi Covid-19 di Jatim. Komisi VIII berharap kebijakan anggaran yang sudah disahkan harus direalisasikan secara cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penanganan pandemi Covid-19 mencapai target yang maksimal.

Moekhlas menjelaskan, untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, Komisi VIII telah meningkatkan alokasi anggaran Bansos Sembako dan Bansos Tunai sebesar Rp 20,4 triliun, sehingga menjadi Rp 124,8 triliun pada tahun 2020. Untuk penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non-

alam, Komisi VIII juga telah menyetujui penambahan alokasi anggaran dana siap pakai sebesar Rp 3,2 triliun, sehingga Rp 3,4 triliun pada tahun 2020.

“Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan di bidang anggaran ini harus direalisasikan secara cepat, tepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penanganan pandemi Covid-19 mencapai target yang maksimal,” papar Moekhlas saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Senin (20/7).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur juga mendapat alokasi anggaran yang berasal dari dana siap pakai, yaitu sebesar Rp 41,355 miliar. Selain menyetujui penambahan anggaran, Komisi VIII juga menyetujui *refocusing* anggaran

mitra komisi VIII, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta BNPB.

Moekhlas memastikan, penanganan terhadap pandemi Covid-19 menjadi perhatian Komisi VIII mengingat jumlah yang terkonfirmasi positif semakin bertambah dan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur misalnya, telah menjadi yang tertinggi setelah Jakarta.

Terkait dengan dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19, terlihat dari semakin bertambahnya persentase penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Timur sejak pandemi Covid-19 semakin meningkat. Pada bulan September 2019 sebesar 10,20 persen, kemudian pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 11,09 persen. Angka ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Indonesia pada bulan yang sama, yaitu pada bulan September 2019 sebanyak 9,22 persen, kemudian pada bulan Maret 2020 menjadi sebanyak 9,78 persen.

Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi VIII yang meliputi bidang agama, sosial, bencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka Komisi VIII perlu mengetahui penanganan dampak pandemi Covid-19 di Jawa Timur terhadap ketahanan sosial, ketangguhan menghadapi bencana serta perlindungan perempuan dan anak. Moekhlas mengatakan, hal ini akan dijadikan rujukan oleh Komisi VIII dalam merekomendasikan kebijakan percepatan penanganan dampak Covid-19 kepada pemerintah. ■ eko/es



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik menyerahkan bantuan kepada Pemrov Jatim. Foto: Eko/MAN

DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam menangani penyebaran pandemi virus Covid-19. Pihaknya mengapresiasi hal ini karena dari seluruh parameter capaian yang dilaksanakan di DI Yogyakarta sangat baik sesuai dengan panduan Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)*.

“(Capaian itu) Baik dalam upaya mencapai target *testing* 1 per 1000 orang per minggu atau 1000 tes PCR per 1 juta penduduk positif *rate* antara 3 sampai 5 persen *tracing* minimal 80 persen dari total kasus kontak,” ucap Ihsan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, di Kota Yogyakarta, Senin (20/7).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja dalam rangka penanganan Covid-19 memberikan perhatian serius terhadap program-program pembangunan di daerah, termasuk pembangunan kesejahteraan sosial melalui dukungan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama, Program Pengurangan Risiko Bencana melalui pembangunan desa tangguh bencana serta kampung siaga bencana, Bantuan Non Tunai, santunan dan dukungan anggaran perlindungan sosial lainnya.

“Program bantuan sosial dampak Covid direncanakan tahun 2020 ini ada penambahan target untuk

”

DARI SELURUH PARAMETER CAPAIAN YANG DILAKSANAKAN DI DI YOGYAKARTA SANGAT BAIK SESUAI DENGAN PANDUAN ORGANISASI KESEHATAN DUNIA

Program Keluarga Harapan dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 15 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 17,858 triliun,” paparnya. Di samping itu, sambung legislator dapil Jambi tersebut, ada penambahan target bantuan sosial sembako dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan kebutuhan anggaran tambahan senilai Rp 7,950 triliun.

“Adapun bantuan sosial dalam anggaran Kementerian Sosial tahun 2021, Komisi VIII menyepakati adanya tambahan anggaran Kemensos tahun 2021 berdasarkan pagu indikatif 2021. Usulan tambahan anggaran 2021 dan rencana penambahan target PKH dan Bansos sembako total Rp 91,911 triliun,” pungkas Ihsan. ■ dep/sf

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus. Foto: Dep/Man



Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor Sangat Baik



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu (tiga dari kanan) usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Bogor. Foto: Husen/MAN

Walaupun berpenduduk sangat besar dengan wilayah sangat luas, namun penanganan kasus pandemi virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dinilai sangat baik. Dari 4.319 kasus, hanya 424 orang yang dinyatakan positif Corona per 16 Juli 2020. Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kabupaten Bogor.

“Kita ingin melihat secara langsung bagaimana penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Meskipun jumlah penduduknya banyak, tapi penanganan Covid-19 termasuk bagus. Pembentukan satuan tugasnya juga berjalan dengan baik,” nilai Rahayu usai pertemuan dengan Bupati Bogor Ade Yasin beserta jajaran, di Cibinong, Jumat (17/7).

Politisi PDI-Perjuangan ini melihat, penanganan Covid-19 terstruktur dan terencana dengan baik, sehingga bila ada persoalan bisa segera ditindaklanjuti. Distribusi sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) juga tersalurkan dengan baik. Dengan jumlah penduduk 5,9 juta jiwa dan berbatasan langsung dengan Jakarta, kasus Covid-19 tak melonjak.

Dijelaskan Bupati Bogor Ade Yasin, asal kasus penularan 60 persen memang dari Jakarta.

Masih kata Ade, kelompok usia terpapar Covid-19 di Kabupaten Bogor terdiri dari 30 persen usia 31-45 tahun. Kelompok usia 46-60 juga 30 persen. Sementara usia 19-30 tahun 21 persen, 6-18 tahun 8 persen, usia lebih dari 60 tahun 6 persen, dan 0-5 tahun sebanyak 4 persen.

Bila berdasarkan jenis kelamin, maka pria mencapai 57 persen dan wanita 43 persen. Ada empat rumah sakit rujukan dan satu rumah isolasi. Kabupaten Bogor sendiri sedang menerapkan PSBB pada 17-30 Juli 2020. ■ mh/sf



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI foto bersama dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto: Ayu/MAN

Komisi IX Apresiasi Penanganan Covid-19 di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dimana DIY sendiri merupakan salah satu daerah yang cukup berhasil menangani pandemi Covid-19 ini.

“Sebelumnya Presiden menyatakan bahwa DIY menjadi salah satu provinsi terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19. Dan setelah kami datang dan melihat langsung ke DIY, hal itu terbukti. Salah satunya terlihat dari minimnya penderita Covid-19 dan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Bahkan angka kematian akibat Covid sejak Maret 2020 lalu hanya 10 orang,” ujarnya saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke DIY, Jumat (17/7).

Politisi yang akrab disapa Melki ini menjelaskan, penanganan yang

sangat baik sejak awal pandemi itu diawali dengan regulasi yang menjadi pegangan kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai kepala daerah sudah berpijak pada Undang-Undang Kebencanaan dalam penanganan Covid-19 di DIY.

Dengan Undang-Undang Kebencanaan tersebut, Pemerintah DIY dapat mengerahkan seluruh potensi yang ada, termasuk pemanfaatan APBD dan dana keistimewaan yang dimilikinya, meskipun belum memperoleh dana atau anggaran penanganan Covid-19 dari pusat. Dengan demikian penderita Covid-19 dapat tertangani dengan baik, sehingga angka kesembuhan penderita pun cukup tinggi, serta penyebaran Covid-19 di DIY pun dapat dicegah dengan baik.

“Namun yang terpenting dari itu sebagaimana yang diungkapkan Sri

Sultan, modal sosial dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tatanan baru melawan penyebaran Covid-19. Artinya Pemerintah D.I.Y mencoba melibatkan masyarakat mulai dari level individu, RT, RW, desa dan seterusnya untuk ikut berperan dalam penanganan penyebaran virus Corona ini,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini usai pertemuan dengan Gubernur DIY beserta jajaran.

Sehingga, masih kata Melki, tumbuh dengan sendirinya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan berbagai kebiasaan hidup sehat, seperti penggunaan masker, cuci tangan dan penggunaan *hand sanitizer*. Dan tak kalah pentingnya selalu menjaga jarak atau *social distancing*, termasuk menghindari berbagai kerumunan. Melki berharap apa yang dilakukan oleh Pemerintah D.I.Y ini bisa menjadi contoh penanganan Covid-19 untuk daerah-daerah lainnya. ■ ayu/es

Saatnya Gotong Royong Lawan Pandemi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengimbau agar semua pihak untuk terus taat dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 agar tetap produktif dalam keseharian. Ia menambahkan, sekarang saatnya untuk bersama-sama dan bergotong royong agar pandemi Covid-19 bisa tertangani maksimal.

Hal ini disampaikannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dyani beserta jajaran, di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (17/7). “Kita harus menguatkan hati dan diri kita untuk tetap harus waspada dan ikhtiar untuk melakukan penanganan Covid-19 sebaik mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat kita,” kata Ansory.

Ia melanjutkan, saat ini seluruh bangsa sedang dihadapkan pada masa sulit yang mengharuskan untuk bergerak bersama menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh dunia dihadapkan pada berbagai perubahan social dan ekonomi yang begitu cepat. “Meskipun demikian, kita berusaha tidak boleh kalah dengan keadaan,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Ansory menerangkan, berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi telah dikeluarkan Pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Diantaranya pemberlakuan PSBB yang bervariasi sesuai dengan kondisi suatu daerah, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk penanggulangan Covid-19 termasuk melakukan realokasi anggaran baik APBN dan APBD.

“DPR RI telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan harapan berbagai kebijakan ekonomi dapat segera berdampak positif bagi penanggulangan pandemi,” paparnya.

Ansory menilai, dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan penanganan Covid-19 dan realisasi stimulus ekonomi masih menemui banyak kendala. Koordinasi lintas sektor dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah masih belum maksimal sehingga berpengaruh pada efektifitas kebijakan penanganan pandemi. Absennya data yang valid juga mempengaruhi proses penyaluran program *social safety net*.

“Untuk itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa lembaga negara

yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dapat berperan lebih nyata dan optimal sehingga penanggulangan Covid-19 dapat lebih cepat, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah,” kilahnya.

Ia menegaskan, selaku wakil rakyat, Komisi IX DPR RI sejak awal juga terus mengawal langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Komisi IX DPR RI juga mendorong agar ada percepatan realisasi stimulus yang saat ini sudah dicanangkan pemerintah termasuk stimulus bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun yang di dalamnya termasuk insentif bagi tenaga kesehatan, santunan kematian dan juga pembayaran klaim kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19,” pungkasnya. ■ es



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar bertukar cenderamata dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dyani di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Foto: Erman/MAN

Sekolah Negeri dan Swasta Harus Sepadan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI mendapat aspirasi dari perwakilan sekolah di Kecamatan

Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, mengenai adanya ketimpangan sarana dan prasarana antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memastikan, pihaknya setuju dengan langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta di Indonesia memiliki kesepadanan dalam menjalankan pendidikan kepada generasi muda.

“Sekolah negeri dan sekolah swasta itu setara, sama-sama berdaya, sama-sama harus mengambil inisiatif, dan sama-sama saling membantu pendidikan anak-anak Indonesia. Pada konteks itu memang perlu dikonkretkan bagaimana caranya Pemerintah tidak memandang sebelah mata pendidikan swasta,” kata Syaiful usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, perangkat daerah dan masyarakat Kecamatan Muara Gembong, di Aula Desa Pantai Bakti, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7).

Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mengusulkan gagasan terkait hal itu dengan sebutan “Sekolah Amanat Undang-Undang”. Konsepnya, jelas Syaiful, daripada Pemerintah membangun sekolah-sekolah negeri baru, lebih baik dananya dipakai untuk membantu biaya operasional sekolah swasta, tapi status sekolah swasta itu nantinya sama dengan sekolah negeri.

“Jadi statusnya pembelajarannya dan seterusnya seperti sekolah negeri. Tentu ini bukan hal yang gampang, karena di dalam regulasi belum



Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI menyerahkan bantuan perahu untuk masyarakat Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Sofyan/MAN

ada. Nanti akan kami perjuangkan semaksimalnya, dan dimasukkan dalam regulasi baru, khususnya terkait dengan isu pendidikan,” komitmen legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengakui ketimpangan sarpras antara sekolah negeri dan swasta bukan hanya terjadi di Kecamatan Gembong, bahkan di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta. Menurutnya, tidak bisa dinafikkan meninggalkan sekolah dan guru swasta. Pendidikan ini tidak cukup digarap hanya Pemerintah atau Pemerintah Daerah, namun juga harus ada keterlibatan pihak swasta.

“Pendidikan harus dilakukan secara gotong royong, secara bersama, untuk itulah makanya peran dari swasta ikut serta dalam hal ini. Itu diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas (Sistem

Pendidikan Nasional). Dan itu terlihat betul bersama-sama. Dalam hal ini, ketika mereka (swasta) membutuhkan bantuan, mereka harus diberikan bantuan dalam konteks kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Putra menambahkan, ketika ada relaksasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihaknya juga sudah menyampaikan kepada Mendikbud, untuk juga memperhatikan murid-murid swasta, bukan hanya di Muara Gembong, tapi di seluruh wilayah Indonesia.

“Dalam pendidikan kita tidak bisa memilah dan memilih. ‘Kamu swasta, kamu guru swasta’, mereka sama-sama warga negara Indonesia yang dilindungi Undang-Undang, jadi kita harus betul-betul melayani mereka sama, baik Pemda maupun Pemerintah,” pesan legislator dapil DKI Jakarta I itu. ■ sf

Konsep Padaringan Kota Bandung Diapresiasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang membuat terobosan dengan mengembangkan konsep Pembelajaran Dalam Jaringan (Padaringan) melalui intranet. Metode ini dapat menjadi solusi terkait masalah kuota atau koneksi internet yang tidak stabil dalam penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

“Saya pikir yang disampaikan Pemerintah Kota Bandung bagus sekali. Ada yang namanya intranet, itu yang kita harapkan. Program yang dibuat oleh Pemerintah, Kemendikbud gratis untuk sekolah-sekolah dan murid-murid,” ungkap Dede usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Bandung

Oded Muhammad Danial beserta jajaran di Balai Kota Bandung, Jumat (17/7).

Dede menuturkan, hingga saat ini masih banyak daerah yang masuk zona merah bahkan hitam, sehingga belum diizinkan melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Para guru dan siswa terpaksa melaksanakan kegiatan belajar melalui metode PJJ secara daring. Namun, keluhan banyak muncul, baik dari guru maupun orang tua karena membengkaknya biaya kuota internet yang digunakan selama PJJ.

Karena itu, konsep Padaringan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut. “Kita mau lihat, kalau program ini bagus dan gratis, bisa saja kita dorong agar seluruh Indonesia memiliki konsep yang seperti itu. Karena memang ini sudah menjadi rekomendasi kita kepada Pemerintah,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Dede menambahkan, tidak menutup kemungkinan PJJ akan diterapkan hingga tahun depan, jika angka kasus Covid-19 terus meningkat. Karenanya, ia mendukung Pemerintah untuk memberikan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama pandemi Covid-19. Relaksasi dana BOS ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian paket data internet selama kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring.

“Kunci utama kalau PJJ diperpanjang sampai tahun depan, maka bebannya kepada Pemerintah, bukan orang tua. Dana BOS yang selama ini dibayarkan untuk membiayai pendidikan mau tidak mau dialihkan kepada Pembelajaran Jarak Jauh. Ini juga sedang kita kaji, agar jangan sampai orang tua yang dibebankan dalam Pembelajaran Jarak Jauh,” kata legislator dapil Jabar II itu.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan, Kota Bandung sedang merintis pembuatan jaringan intranet yang dinamakan Padaringan atau Pembelajaran Dalam Jaringan. Konsep Padaringan merupakan sistem dalam bentuk *Metropolitan Area Network* (MAN), yakni jejaring internet berkecepatan tinggi yang bisa menjangkau satu kota.

“Sebanyak 274 SD negeri 3 TK Negeri dan 64 SMP Negeri akan dipasang pemancar yang terkoneksi dengan server di Dinas Pendidikan,” kata Hikmat kepada Tim Komisi X DPR RI. Menurut dia, melalui Padaringan, sekolah, siswa, dan guru bisa berada di dalam satu jejaring yang memungkinkan mereka mengakses pembelajaran tanpa harus dibebani biaya kuota internet. Dengan begitu, PJJ bisa dilaksanakan secara gratis. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf M Effendi saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial beserta jajaran di Balai Kota Bandung. Foto: Anne/MAN

Tegal Belum Jalankan KBM Tatap Muka

Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memulai tahun ajaran baru 2020/2021 pada pertengahan Juli 2020. Disampaikan Pemerintah, hanya yang berada di zona hijau sebanyak 6 persen atau sekitar 85 kabupaten/kota yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan persyaratan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin.

Namun ternyata tidak semua yang zona hijau menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi. Salah satunya Kota Tegal, Jawa Tengah. Tegal merupakan zona hijau, namun Pemerintah Daerah (Pemda) belum membuka KBM tatap muka karena masih banyak peringatan dari orang tua yang menolak pembelajaran tatap muka.

“Disampaikan Pemda, dari hasil survei yang mereka lakukan, 91 persen orang tua menolak anaknya mengikuti KBM tatap muka di tengah pandemi. Sehingga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih menjadi andalan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Kota Tegal, di Balai Kota Tegal, Jumat (17/7).

Langkah Pemda itu diapresiasi Komisi X DPR RI. Menurut Fikri, di tengah pandemi Covid-19 ini, kebijakan KBM tatap muka agar menjadi kewenangan Pemda. Pasalnya, mereka yang lebih memahami kondisi wilayahnya masing-masing. “Kebijakan penerapan kegiatan belajar tatap muka dikembalikan saja ke Pemda, sehingga mereka bisa berekspres dari kurikulum hingga ke akses internet (penggunaan internet lokal),” kata Fikri.

Penyelenggara pembelajaran di zona hijau memang tidak mudah,

karena sekolah harus memprioritaskan keselamatan siswa, guru dan tenaga kependidikan. Namun, di sisi lain, lanjutnya, pembelajaran daring juga masih menemukan sejumlah kendala. Misalnya, siswa memiliki *handpone* namun kurang mendukung, ada yang tidak punya laptop, hingga tidak ada sinyal internet. “Semua masukan yang kami (Komisi X) terima hari ini, aka kami bahas di dalam Panitia Kerja (Panja) Pendidikan bersama dengan pemerintah,” kata politisi Fraksi PKS itu.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi mengaku tidak mau terburu-buru dengan kembali memperbolehkan sekolah di wilayahnya menggelar KBM tatap muka. Jumadi mengatakan, meski Kota Tegal disebut zona hijau dan sudah mulai menerapkan kenormalan baru, namun sebagian besar orang tua masih belum menginginkan anaknya kembali belajar

di sekolah. “Berdasarkan survey, 91 persen orang tua masih menolak untuk anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka,” katanya.

Jumadi mengatakan, KBM tatap muka awalnya sempat akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2020. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya semua itu dibatalkan. Meski demikian, kata Jumadi, pihaknya berencana mulai Agustus 2020 mendatang akan menggabungkan KBM daring dengan KBM tatap muka.

“Pemkot menunda yang semula Juli pembelajaran tatap buka. Mulai awal Agustus mendatang KBM dengan kombinasi tatap muka dan daring,” terang Jumadi. Menurutnya, penyelenggaraan sekolah harus berprinsip pada kesehatan dan keselamatan peserta didik. Untuk itu, sementara masih berfokus terhadap pendidikan daring. ■ rmm/sf



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertukar cenderamata dengan Wakil Wali Kota Tegal. Foto: Ria/MAN

Baleg Bahas Klaster Kemudahan Berusaha RUU Ciptaker

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetap menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) di tengah Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 guna melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, rapat kali ini dalam rangka meminta masukan dari para ahli dan persetujuan usulan dari Fraksi-Fraksi.

“Khusus untuk pembahasan RUU Cipta Kerja kita lanjutkan di masa reses ini dengan meminta masukan dari ahlinya langsung dan persetujuan serta usulan dari Fraksi-Fraksi yang ada di DPR,” kata Supratman saat memimpin Rapat Panja DIM RUU Cipta Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Supratman mengatakan pembahasan DIM RUU Cipta Kerja sudah menginjak klaster kemudahan dalam berusaha. Menurutnya, dinamika pembahasan berjalan baik. Hampir semua fraksi sepakat agar RUU tersebut memberi kemudahan di sektor UMKM.

”

**HAMPIR SEMUA
FRAKSI SEPAKAT
AGAR RUU
TERSEBUT MEMBERI
KEMUDAHAN DI
SEKTOR USAHA
MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)**

“Pembahasan RUU ini sudah sampai kemudahan dalam berusaha. Sejauh ini pembahasan berjalan baik. Hampir semua Fraksi sepakat agar RUU memberi kemudahan usaha mikro,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kemudahan berusaha dalam RUU *Omnibus Law* ini diatur menjadi berbasis risiko. Yakni usaha risiko rendah, sedang, dan tunggu. Usaha risiko rendah tak memerlukan izin, melainkan cukup registrasi. Adapun usaha risiko sedang akan diatur agar memenuhi standar. “Kalau dia jenis usahanya berisiko tinggi, maka dia perlu izin di dalamnya mencakup AMDAL,” tutup legislator dapil Sulawesi Tengah itu. ■ tn/sf

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.
Foto: Jaka/MAN



Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 untuk Bangkitkan Ekonomi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta Pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi. Untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak optimal maka desain RAPBN 2021 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada tahun 2021 dan berhasilnya capaian target ekonomi pada tahun 2020.

“Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN,” ujar Said melalui siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Senin (20/7). Untuk itu, lanjut Said, struktur APBN harus berani ekspansif. Karena, ruang fiskal bisa diperluas dengan dukungan kebijakan utang yang dinaikan, dari 34 persen menjadi 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan

defisit fiskal pada kisaran 5,2 persen.

“Target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagaimana yang menjadi target Pemerintah harus disokong dengan ruang fiskal yang lebih longgar dari tahun ini,” saran Said. Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, perekonomian Indonesia masih penuh tantangan besar pada 2021 nanti. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih menghantam perekonomian global, termasuk perekonomian nasional.

Kondisi tersebut, menurut Said menyebabkan sektor privat terpuruk. Dengan terpukulnya sektor riil maka otomatis belanja Pemerintah menjadi andalan. “Walaupun situasi tahun depan kemungkinan besar tantangannya tidak seberat tahun ini, namun tahun 2021 tetap membutuhkan dukungan besar kebijakan fiskal,” terang Said.

Anggota Komisi XI DPR RI ini lalu mengidentifikasi 5 tantangan yang harus dihadapi pada 2021. Pertama, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam tahun 2020, menjadi prasyarat dalam menyusun kebijakan RAPBN Tahun 2021. Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan adalah efektifitas penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan.

Untuk itu, Pemerintah perlu memperbaiki realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid 19 yang masih rendah. Adapun realisasi per 1 Juli 2020 masih sebesar Rp 127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Kedua, soliditas dan sinergi otoritas fiskal dan moneter harus tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting

untuk memastikan keberlangsungan program PEN. Salah satunya adalah memastikan kebijakan berbagi beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI untuk memenuhi kebutuhan anggaran barang publik (public goods) dan barang non-publik (non-public goods), terlaksana secara adil, transparan dan berkelanjutan.

Ketiga, masih kata Said, perluasan inklusi keuangan untuk UMKM, sehingga likuiditas UMKM tidak semata bertumpu pada perbankan dan insentif fiskal Pemerintah. Salah satu alternatifnya adalah memperluas basis pembiayaan UMKM dengan membuka opsi pasar modal “di skala UMKM”. “Dengan catatan, keuangan dan usaha UMKM yang sehat. Bila UMKM sehat sesungguhnya sangat layak mendapatkan perluasan pembiayaan dari pasar modal,” imbuhnya.

Keempat, masih kata Said, desain belanja program pada RAPBN 2021 harus mampu menjawab permasalahan yang harus diintervensi. “Menjaga daya beli masyarakat lapis bawah, perluasan basis ekspor yang tidak hanya menggantungkan pada komoditas, dan memperluas lapangan kerja yang kompatibel dengan angkatan kerja kita dengan *me-leverage* usaha UMKM,” terang politisi asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI ini.

Kelima, lanjut Said, memitigasi dampak eksternal, khususnya ketegangan kawasan di Laut Cina Selatan, dan di Teluk, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, belum pulihnya resesi global, terutama di negara negara tujuan ekspor dan impor, dan kebijakan The Fed yang berdampak pada sektor moneter. ■ rmm/sf



Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah. Foto: Oji/Man

GOPAC Tetap Konsisten Promosikan Antikorupsi



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memimpin rapat virtual Komite Eksekutif GOPAC. Foto: Abu/MAN

Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) kembali ingin menegaskan dirinya untuk selalu konsisten mempromosikan gerakan antikorupsi kepada dunia. Gerakan ini terus berjalan meski di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Demikian mengemuka saat Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin rapat virtual Komite Eksekutif GOPAC, baru-baru ini di Jakarta. Fadli sendiri adalah Wakil Ketua GOPAC. Rapat tersebut membahas rencana aktivitas GOPAC tahun 2020.

GOPAC yang merupakan satu-satunya organisasi parlemen dengan tujuan tunggal memberantas korupsi di seluruh dunia, berkomitmen secara aktif mempromosikan dan memperkuat peran parlemen mengambil tindakan terukur melalui berbagai program dalam

gerakan global anti-korupsi.

Dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Fadli mengapresiasi semangat dan komitmen para anggota Komite Eksekutif yang terus berjuang bersama memberantas korupsi meski di tengah situasi pandemi corona. Diharapkan ke depan GOPAC mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi internasional lainnya dalam memberantas korupsi.

Sebagai anggota dari United Nations Economic and Social Council (UN-ECOSOC), GOPAC akan secara aktif mengawal dan berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan sesi khusus anti-korupsi dalam sidang umum PBB (UN Special Session of The General Assembly Against Corruption) yang akan dilaksanakan pada 26-28 April 2021.

Fadli juga mendorong anggota GOPAC melalui chapter nasional maupun regional, memberikan

”

BERKOMITMEN SECARA AKTIF MEMPROMOSIKAN DAN MEMPERKUAT PERAN PARLEMEN MENGAMBIL TINDAKAN TERUKUR MELALUI BERBAGAI PROGRAM DALAM GERAKAN GLOBAL ANTI-KORUPSI

pernyataan mengenai kesuksesan inisiasi anti-korupsi yang dibentuk oleh parlemen-parlemen negara anggota GOPAC. GOPAC juga akan berpartisipasi dalam 19th Internasional Anti-Corruption Conference (IACC) yang dijadwalkan terselenggara pada 1-4 Desember di Busan, Korea Selatan.

IACC merupakan forum utama global untuk menyatukan kepala negara, masyarakat sipil, swasta, dan *stakeholder* lainnya untuk mengatasi tantangan yang semakin canggih yang ditimbulkan oleh korupsi. GOPAC secara rutin mengadakan sesi khusus dalam kegiatan IACC dengan mengangkat isu anti-korupsi dalam persepsi dunia parlemen.

Rapat Komite Eksekutif GOPAC ini juga dihadiri oleh Ketua GOPAC H.E. Ahmad bin Zaid Al Mahmoud (Ketua Shura Council Qatar), Wakil Ketua GOPAC H.E. Justin Muturi (Ketua Parlemen Kenya), Wakil GOPAC Dr. Carlos Alberto Perez Cuevas (Mexico), Sekretaris GOPAC John Hyde (Australia), Bendahara GOPAC Mary King (Trinidad and Tobago), dan Member-at-Large. ■ mlh/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bersepeda bersama *Parle Cycling Community* (Parle CC). Foto: OJJ/MAN

Sekjen DPR Resmikan Komunitas Sepeda Parlemen

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengukuhkan Komunitas Sepeda Parlemen atau *Parle Cycling Community* (Parle CC) di lingkungan Kesetjengan DPR RI. Indra mengungkapkan, Parle CC yang terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat Kesetjengan, sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 ini, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga.

Demikian disampaikan Indra usai meresmikan *Parle Cycling Club*, di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7). “Jadi, dengan olahraga yang teratur bisa menjaga kebugaran kita dalam menjalankan tugas-tugas rutinitas. Nah, pada saat masa reses ini, kita semua baik

pegawai dan jajaran pejabat Setjen DPR RI menyempatkan berolahraga bersama. Kedepannya, kita akan budayakan dan lembagakan untuk sama-sama kita menjaga kesehatan,” ujar Indra.

Ke depannya, masih kata Indra, pihak Kesetjengan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap Anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda. Untuk kemudian, bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan ‘gowes’, kegiatan *gowes* ini nantinya juga akan dirutinkan.

Tak kalah pentingnya, Indra menekankan, Parle CC menjadikan protokol kesehatan sebagai prioritas, sebagai suatu keharusan dan budaya dalam beraktivitas di lingkungan DPR. Seperti, dalam aktivitas berolahraga maupun dalam menjalankan tugas sehari-hari di era kenormalan baru (*new normal*).

“Tentunya, protokol kesehatan itu yang utama. Bahwa, dalam berolahraga dan dalam menjalankan tugas sehari-hari, kita sudah menguatkan menetapkan protokol kesehatan secara ketat di era *new normal*. Saya kira, yang paling penting bahwa protokol kesehatan itu akan terus menjadi satu keharusan dan budaya di lingkungan DPR ini,” pungkas Indra.

Turut hadir dalam peresmian Parle CC antara lain yaitu Deputi Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pimpinan DPR RI selaku Ketua Parle CC Djaka Dwi Winarko, Ketua KOPRI DPR RI Indra Pahlevi serta diramaikan jajaran pejabat dan pegawai Setjen DPR RI. Usai peresmian, Parle CC melakukan *gowes* dengan rute dimulai dari pintu gerbang DPR RI – TVRI – Jalan Gatot Soebroto – lalu kembali ke Kompleks DPR RI. ■ pun/es

Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi seluruh Pimpinan DPR RI bersama Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB, Menhan, dan Mensesneg menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam kesempatan tersebut Puan menegaskan bahwa konsep RUU BPIP yang diserahkan Pemerintah berbeda dengan substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah/utusan Presiden yang dipimpin Menkopolhukam untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR RI untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas Bersama atau menadapat masukan dari masyarakat,” ucap Puan di Media Center DPR RI, selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Puan menyampaikan, konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP, yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

“Konsep yang disampaikan Pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tegas Puan lebih lanjut.

Dalam konsideran, sambung politisi

Fraksi PDI-Perjuangan itu, juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dikatakannya, DPR dan Pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.

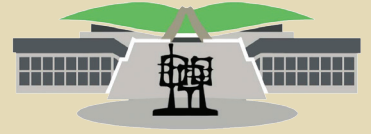
“DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP tersebut, apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP,” tandas Puan.

Ia berharap, setelah terjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah ini maka segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat diakhiri dan semua kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong-royong melawan pandemi virus Corona (Covid-19) dan dampak-dampaknya.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa kehadirannya bersama dengan Mensesneg, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB dan Menhan adalah sebagai wakil Pemerintah untuk membawa Surat Presiden yang berisikan tiga dokumen, yakni dokumen surat resmi dari Presiden kepada Ketua DPR RI, dan dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP yang selama ini sudah ada. ■ dep/es



Konferensi pers Pimpinan DPR RI dan para Menteri terkait RUU BPIP di Media Center DPR RI. Foto: Jaka/MAN



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Pimpinan Baleg, dan Anggota DPR RI menerima perwakilan massa dari serikat pekerja KSBI dan perwakilan mahasiswa, di Gedung Nusantara III Lantai 4, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Foto: Arief/MAN



Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKS) Indonesia-Turki Muhammad Farhan saat pertemuan dengan Direktur Eropa 3 Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Foto: Arief/MAN



Pelantikan dan pengambilan sumpah Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP – RI) Periode 2020-2024. Proses pengambilan sumpah dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dan dihadiri secara fisik oleh Anggota KPP – RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7). Foto: Azka/Man

